

Ekonomi Politik Pariwisata Di Indonesia: Lintas Masa Pandemi Covid-19

Ria Anisa

Afiliasi: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
Korespondensi Penulis: ria.anisa@apmd.ac.id

ABSTRAK

Kesadaran atas kerusakan alam akibat pertambangan mineral, sukses memposisikan pariwisata sebagai sarana ekonomi baru non migas. Sebagai salah satu komoditas dari ekonomi terbarukan Indonesia gencar memacu pertumbuhan sektor pariwisata. Pariwisata juga menjadi salah satu alat dan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Saat ini, kebanyakan penelitian tentang pariwisata hanya melihat dampak ekonomi, maka dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat transisi politik pariwisata berdasarkan tiga linimasa; sebelum pandemi, pada saat pandemik dan pakca pandemik. Besar keyakinan peneliti bahwa menjadi sangat penting mengkaji transisi konsep ekonomi politik pariwisata adaptasi terhadap linimasa pandemik covid-19. Terlebih bila mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak akibat pandemik covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan data dari berbagai jurnal terdahulu. Kesimpulannya, bahwa peran aktor memiliki dampak politik terhadap proses pengelolaan pariwisata. Bila pemerintah terlalu dominan berperan dalam pengelolaan pariwisata akan menghasilkan pariwisata yang bermodel top down. Dampaknya keterlibatan masyarakat akan minimal dan kebermanfaatan pariwisata bagi pembangunan akan semakin bias. Kehadiran pasar juga memungkinkan menjadi alternatif bagi pemerintah maupun masyarakat saat mengalami kesulitan dalam pengelolaan pariwisata.

Kata Kunci: Politik Pariwisata, Ekonomi Politik Pariwisata, Pariwisata Premium Labuan Bajo

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memanfaatkan sektor pariwisata sebagai penunjang ekonomi. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Era Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pariwisata adalah salah satu dari elemen prioritas ekonomi. Salah satu bentuk implementasinya, Jokowi memberikan suntikan modal 470 milyar rupiah. Dana tersebut digelontorkan karena ada beberapa terobosan pembangunan pariwisata yang akan direalisasikan, diantaranya percepatan pembangunan wisata premium di Kawasan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Melalui kebijakan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan

Pariwisata Labuan Bajo Flores menjadi salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Indonesia. Program ini juga dikenal dengan sebutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, NTT. Tidak hanya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, NTT, terdapat empat destinasi yang masuk dalam DPSP lainnya, yaitu; Danau Toba-Sumatera Barat, Candi Borobudur-Jawa Tengah, Mandalika-Nusa Tenggara Barat, dan Likupang-Sulawesi Utara. Populernya, DPSP dikenal dengan sebutan sepuluh Bali baru.

Program DPSP, dikerjakan secara lintas kementerian. Ada empat kementerian yang berelaborasi didalamnya, yakni antara Kementerian Kominfo, Kemenko Maritim Investasi, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Desa. Implementasi pengerjaan proyek ditangani oleh kementerian PUPR. Kelimanya berkolaborasi dalam menjalankan percepatan program kerja guna mengembangkan lima kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Sejak tahun 2018 pembangunan dan progress Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Indonesia terus berlanjut. Proses implementasi kebijakan dan proyeksi pariwisata berjalan seperti rencana seperti biasa, namun kondisi berubah lebih menarik saat dunia global diguncang pandemic virus Covid-19.

Mewabahnya virus corona lintas global disinyalir akibat perpindahan manusia. Perpindahan ini beresiko tinggi terhadap penyebaran virus. Maka, pada masa pandemik, semua stakeholder terlibat dalam penanganan dalam pengaturan pergerakan manusia, diantaranya kegiatan pariwisata. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) menyebut pariwisata mengalami krisis akibat pandemik virus covid-19. Begitu pula dinamika pariwisata Indonesia, mulai berubah sejak konfirmasi masuknya wabah covid di Indonesia, pada Maret 2020. Dinamika dan dilemma akibat benturan antara sektor kesehatan dan ekonomi menyulitkan gerak pemerintah Indonesia. Meskipun pada akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan kebijakan menekan situasi endemik pada tanggal 15 Maret 2020 dengan cara penekanan pergerakan masyarakat. Masyarakat disarankan untuk menunda bepergian, dan menganjurkan berkegiatan dari rumah. Akibatnya, destinasi wisata sepi, tidak sedikit destinasi wisata memutuskan tutup operasional sementara hingga keadaan kembali normal.

Sedangkan di satu sisi lainnya, negara masih membutuhkan devisa masuk dari sektor pariwisata. Masyarakat juga demikian, sisi lain memepertaruhkan faktor kesehatan, namun kebutuhan hidup tidak dapat terhenti akibat berhentinya pergerakan manusia dalam aktivitas pariwisata. Dampaknya tidak sesederhana yang dibayangkan. Di Indonesia, pembatasan

pergerakan manusia dan pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan okupansi yang terlibat dalam proses pariwisata terdampak. Pelaku pariwisata, baik itu hotel, travel agent dan masyarakat ekonomi yang menggantungkan pada destinasi wisata juga terdampak drastis hingga hilangnya pendapatan. Anjuran “sektor pariwisata ditutup sementara”, namun tidak sedikit sektor pariwisata tutup permanen karena merugi akibat tidak adanya pemasukan lagi.

Krisis pariwisata menjadi persoalan serius bagi pemerintah saat memasuki masa new normal paska pandemik. Seperti Indonesia, segala upaya dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan sektor pariwisata. Diantaranya, perhelatan agenda politik G-20 sebagai pintu gerbang pembuka upaya recovery sektor pariwisata. Terkait politik politik pariwisata, ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait. Pertama, Kawasan Lagoi, Kepulauan Riau, yang dikelola oleh PT. Bintang Resort Cakrawala (BRC) merupakan sebuah Kawasan wisata yang menjadi pertukaran antara keuntungan ekonomi dan politik. Kawasan Lagoi dibangun sejak tahun 1990 yang merupakan hasil kerja sama Indonesia dengan Singapura. Saat ini, sebagai alat transaksi di Kawasan Lagoi menggunakan dolar Singapura dan dolar Amerika serikat (Marina; 2012). Kawasan ini cukup krusial bagi Kabupaten Bintan, dikarenakan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini membahas tentang benefit ekonomi dan politik dari pariwisata, namun tidak membahas mendalam bagaimana proses politik pariwisata dapat mempertahankan kelangsungan pariwisata. Atau spesifik mendalami aktor siapa saja yang terlibat dalam proses politik tersebut. Kedua, kajian tentang pengembangan daerah wisata dalam bingkai politik pariwisata. Kajian ini mengindikasikan adanya perubahan susunan kekuasaan dan nilai-nilai pada sebuah wilayah setelah hadirnya pariwisata. Kepentingan dan nilai dalam proses pariwisata saling bertentangan satu sama lainnya saat proses pariwisata tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Kapitalisasi dan komodifikasi sebagai akibat dari globalisasi pasar juga berdampak pada perluasan pasar pariwisata. Unsur kapitalis ini juga berdampak pada konsep pariwisata tentang benefit apa yang didapatkan dan sumber perolehan manfaatnya. (Prasiasa; 2022). Penelitian ini berbeda dari kedua penelitian terdahulu dan akan berfokus pada peran dari masing-masing aktor dalam setiap pengembangan daerah wisata.

Sehingga, sangat menarik untuk melihat bagaimana politik pariwisata di manajemen selama tiga linimasa tersebut. Sebagaimana bahwa pariwisata tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial politik tempat pariwisata itu terjadi. Pertimbangan lainnya, bahwa faktor politik dalam aktivitas kepariwisataan terutama saat pandemik sangat memungkinkan terjadi. Selain kepentingan individu dalam pemanfaatan waktu senggang (leisure time) seseorang pulihnya pariwisata secara cepat juga akibat kebosanan aturan lock down yang diinstruksikan di berbagai belahan dunia. Ataupun alasan kedua, yakni hasil dari lobi-lobi kekuasaan ekonomi dan sosial baik di dalam dan di luar negeri sebagai hasil dari perjuangan politik memulihkan sektor pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pengetahuan ukuran korelasi dan kausal antar variabel dari penelitian terdahulu. Data kuantitatif berasal dari dokumen penelitian yang didapatkan melalui laman online, google scholar. Data diolah kembali dengan cara mengeksplorasi makna, menghubungkan keterkaitan, dan perbedaan antar konsep atau kasus. Hal ini akan memudahkan peneliti mengkategorisasikan dan menginterpretasikan data, sehingga dalam pengidentifikasi keterlibatan aktor dalam proses ekonomi politik pariwisata Indonesia akan lebih cepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memanfaatkan sektor pariwisata sebagai penunjang ekonomi. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Era Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pariwisata adalah salah satu dari elemen prioritas ekonomi. Salah satu bentuk implementasinya, Jokowi memberikan suntikan modal 470 milyar rupiah. Dana tersebut digelontorkan karena ada beberapa terobosan pembangunan pariwisata yang akan direalisasikan, diantaranya percepatan pembangunan wisata premium di Kawasan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Melalui kebijakan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores menjadi salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Indonesia.

Konsep Ekonomi Politik Pariwisata

Ekonomi dan politik adalah dua cabang ilmu yang berbeda. Saat ekonomi menjadi ekonomi politik maka terjadi pergeseran makna dan perdebatan. Ekonomi politik dipahami sebagai manajemen terhadap urusan ekonomi dalam sebuah negara yang menimbulkan perdebatan tentang (1) apa kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab dari negara (2) apakah kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi lebih baik jika dilakukan negara atau pihak swasta? Ragam ekonomi politik masih terbagi dalam berbagai pendekatan dan berbagai pendekatan yang mewarnai di dalamnya, pendekatan klasik, Marxian, Keynesian, kekuasaan, keadilan dan regulasi. Hal tersebut membuat perspektif ekonomi politik makin kaya analisis. Dari ragam tersebut, Penelitian ini memilih garis besar perspektif ekonomi politik dengan pendekatan regulasi. Ada dua kelompok besar teori regulasi ekonomi. Pertama, tradisi kelompok ini mengasumsikan bahwa regulator memiliki informasi yang cukup dan kekuatan penegakan secara efektif mempromosikan kepentingan publik. Tradisi ini juga mengasumsikan bahwa regulator adalah baik dan bertujuan untuk mengejar kepentingan umum. Maka, kelompok ini sering disebut ‘public interest theories of regulation’. Kedua, Regulator tidak memiliki informasi yang memadai sehubungan dengan biaya, permintaan, kualitas, dan dimensi perilaku perusahaan. Karena itu, mereka memandang regulator secara tidak sempurna dalam mempromosikan kepentingan publik. Kelompok ini memandang bahwa regulator hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak termasuk unsur-unsur kepentingan umum. Maka kelompok ini disebut “private interest theories of regulation”.

Menggunakan garis besar teori regulasi dalam perspektif ekonomi politik, penelitian ini akan difokuskan lagi pada konsep ekonomi pariwisata. Masuknya kajian ekonomi politik dalam pariwisata karena dewasa ini sektor pariwisata menjadi bagian penting dalam sektor ekonomi yang melibatkan proses politik. Kegiatan pariwisata sendiri telah terjadi sejak lama, diprediksikan kegiatan pariwisata muncul sekitar abad ke-13, dengan rekam jejak Marco polo dalam karyanya “The Travel of Marco Polo” berisi tentang pengalamannya bersaudagar sampai ke jalur sutra sekitar tahun 1271 sampai 1295. Karyanya menjadi sangat terkenal dan menjadi inspirasi karya karya lainnya tentang aktivitas pariwisata. Masuk keabad 17 sampai 19

pariwisata mulai menjadi kebutuhan lalu masuk pada proses komersialisasi pariwisata sekaligus bagian dari sektor ekonomi. Sedangkan Studi tentang pembangunan pariwisata sudah ditandai dengan perdebatan antara pembahasan pariwisata dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan penyusunan struktur logika teori analisis ekonomi politik. Meski diawal Level teorikal yang dianggap lemah, namun beriringnya waktu pendekatan ekonomi politik di sektor pariwisata semakin stabil karena banyak negara mengimplementasikan pembangunan ekonomi dari basis pariwisata dengan rangkaian proses politiknya. Maka ekonomi politik terbentuk antara kekuatan sosio-ekonomi dan struktur kekuasaan yang terlibat didalamnya karena semakin banyak kebutuhan lintas sektor dan rawan konflik yang terjadi di pariwisata. Saat ini, pendekatan ekonomi politik di pariwisata sangatlah beragam. Dari ragam konsep tersebut, penelitian ini memilih dua konsep yang ditawarkan oleh Dr. Jan Mosedale dan Prof. Richard Sharpley.

Pertama, Jan Mosedale adalah seorang akademisi University of Applied Sciences HTW Chur, Switzerland. Mosedale memiliki banyak publikasi dan pembahasan mengenai ekonomi politik pariwisata sebagai *The Political Economy of Tourism: Regulation Theory, Institution, and Government Network*. Ketiga hal tersebut sangat penting karena aspek pariwisata melibatkan multi aktor, baik itu aktor negara, Lembaga non negara, perusahaan dan individu internasional. Regulasi terdiri dari kumpulan norma formal dan informal, aturan, kode, praktik sosial dan institusi yang menopang kelangsungan hidup rezim dengan menyediakan aturan dasar untuk perilaku ekonomi dan untuk resolusi konflik. Institusional ekonomi dipahami sebagai lingkungan kelembagaan dan pengaturan kelembagaan tertentu. Lingkungan kelembagaan mengacu pada struktur informal seperti norma sosial, konvensi dan adat istiadat serta hukum dan peraturan yang diformalkan secara resmi. Ekonomi politik institusional mengakui bahwa organisasi kapitalisme dipengaruhi oleh hubungan antara struktur dan institusi sosial-politik dan budaya. Perubahan relasi antar pemerintah membuat ekonomi sosial tidak terbatas pada transaksi sosialisasi dan rencana ekonomi ke demokrasi dan pasar. seperti, Analisa ekonomi politik terhadap kasus buruh dan pelaku sektor pariwisata, Analisa ekonomi politik perbandingan antar Lembaga-lembaga yang mengorganisir persoalan pariwisata. Jaringan pemerintah dalam pariwisata dewasa ini semakin kompleks karena pelaku pariwisata, penyedia dan dampak pariwisata lintas sektor dan lintas aktor. Maka ketiga indikator ini menjadi sangat penting untuk melihat ekonomi politik pariwisata. Disamping itu, Mosedale

juga memiliki gagasan tentang tourism, political economy of nature and political ecology dan beberapa topik lainnya yang sangat relevan dan kontekstual.

Kedua, Richard Sharpley adalah seorang professor dan seorang dosen senior di University of Central Lancashire. Topik yang didalami adalah isu tentang pariwisata berkelanjutan, dan pembangunan. Terinspirasi dari ilmuwan David Harrison, Yang sebelumnya yang lebih dulu melakukan kajian relevansi teori pembangunan dalam pariwisata. Menyimpulkan bahwa teori pembangunan telah berkontribusi dalam pengetahuan dan pemahaman dalam pengembangan pariwisata. Beberapa pertanyaan yang mendasari gagasannya (1) apakah benar pariwisata adalah paspor pembangunan? (2) dilemma pariwisata dan pembangunan. Yang menghasilkan konsep pariwisata telah dibingkai dengan konsep degrowth yang menghasilkan kebijakan sustainability tourism. Lebih khusus lagi, ia berpendapat bahwa dalam konteks krisis lingkungan global dan kebutuhan pertumbuhan dan konsumsi pariwisata, maka degrowth dapat dianggap dijadikan pendekatan yang layak dalam perkembangan konteks pariwisata. Dalam paper sustainability tourism governance local or global membimbing pemahaman bagaimana pengelolaan pariwisata berkelanjutan harus dikelola. Pertanyaan Sharpley bukan menolak gagasan think global, act local, karena bagaimanapun sektor pariwisata harus mementingkan regenerasi dan memenuhi perkembangan sosio-ekonomi manusia. Tantangan global ini dapat diatasi dengan kebijakan Tindakan dan kesepakatan solusi dan koordinasi ditingkat global. Maka, sebuah destinasi pariwisata bukan berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan dengan sistem pariwisata global. Ini yang menguatkan gagasan Sharpley dan Harrison dalam pembangunan dan pariwisata (1) tourism and development: economic perspective, bahwa yang paling utama dari pembangunan pariwisata adalah ekonomi, selanjutnya pembangunan sosial (bisa mengikuti namun juga bisa gagal mengikuti pembangunan sosial). (2) community base tourism (CBT): kolaborasi dan partnership (3) alternative tourism: green tourism, nature tourism, adventure tourism, responsible tourism, and ecotourism. (4) pro poor tourism: menciptakan akses masyarakat miskin dalam pariwisata.

Transisi Dinamika Ekonomi Politik Pariwisata lintas linimasa Pandemi Covid-19

Dari pemaparan kedua konsep tersebut, penelitian ini akan melihat transisi politik pariwisata di Indonesia focus pada aktor yang terlibat dalam Kolaborasi dan kemitraan pariwisata. Aktor menarik untuk diteliti karena sangat penting untuk mengetahui proses politik yang ada dalam transaksi ekonomi pariwisata. Aktor menjadi kunci utama dari sebuah kebijakan dan proses transaksi politik yang menyertainya. Antar aktor memungkinkan terjadinya kolaborasi dan kemitraan tentu menjadi bagian sangat penting dalam proses keberlangsungan pariwisata. Aktor memungkinkan pariwisata menemukan jalan alternative dalam proses recovery. Alternatif menjadi penting pula dalam proses pemulihan industri pariwisata paska pandemic covid-19.

Politik Pariwisata sebelum Pandemi Covid-19

Pada dinamika politik sebelum pandemi, analisis berasal dari Pembangunan pariwisata Taman Nasional Komodo (TN Komodo) di Kawasan pulau Komodo. Pembangunan destinasi ini pernah mendapatkan peringatan dari United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) terkait dugaan pelanggaran konservasi alam. Proyek pembangunan lokasi Taman Nasional Komodo ini diinstruksikan agar dihentikan. Penelitian *Tourism Governance In Komodo National Park, Indonesia: Blessing or Curse?* menjelaskan dampak manajemen pariwisata Taman Nasional Komodo (TNK) dari pendekatan sosio ekonomi masyarakat lokal disekitarnya. Penelitian dilakukan di dua desa terdekat TNK dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata TNK tidak signifikan memberikan berkah dan keberuntungan bagi masyarakat. (1) area TNK mayoritas didominasi oleh pegawai TNK, warga lokal mayoritas menjadi pemandu wisata. (2) dampak kesejahteraan dan kemakmuran pariwisata TNK hanya dirasakan oleh warga yang menempati Kawasan Pulau Komodo tidak termasuk Pulau Rinca. Penduduk asli Rinca mayoritas adalah nelayan yang tidak masuk dalam siklus wisata secara langsung. (3) pemerintah melakukan pembangunan di wilayah Kawasan TNK hanya berfokus ada fasilitas pariwisata sedangkan pembangunan yang berorientasi kebutuhan masyarakat masih sangat rendah. (Kodir et al., 2019).

Sebuah penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Manggarai Barat, menunjukkan bahwa pariwisata belum mengoptimalkan kearifan lokal. Peristiwa pariwisata dalam artikel ini melibatkan tiga aktor utama, yakni pemerintah (state), swasta (private) dan masyarakat sipil (civil society). Komunikasi dan koordinasi dari pemerintah ke masyarakat belum berjalan optimal. Ditambah lagi faktor eksternal (sosial, ekonomi, dan politik) masyarakat “belum siap” terlibat dalam implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal. Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Manggarai Barat masih diwarnai oleh dominasi pemerintah daerah semata. Promosi Kearifan Lokal di Kabupaten Manggarai Barat sebagai aset potensial pariwisata belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari keberadaan dari pariwisata berbasis kearifan lokal tersebut belum signifikan. Model implementasi kebijakan pariwisata yang diterapkan di kabupaten Manggarai Barat menggunakan pendekatan top-down. Penggunaan model implementasi ini didasari oleh situasi riil yang ada di lapangan yang menunjukkan bahwa hampir semua kebijakan di ranah publik didominasi oleh pihak pemerintah semata. Sedangkan keterlibatan aktor di luar pemerintah, terlebih masyarakat masih bersifat pasif. Implikasinya adalah aktivitas pariwisata berbasis kearifan lokal belum berkontribusi secara optimal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat dari sisi ekonomi.

Politik Pariwisata pada saat Pandemi Covid-19

(Post-) pandemic tourism resiliency: Southeast Asian Lives and Livelihoods in Limbo
Kathlee M. Adams, Jaeyon Choe, Mary Mostafanezhad dan Giang Thi Phi menulis jurnal tentang akibat pandemik covid-19, kehidupan sektor pariwisata dan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya berada dalam “limbo” (keadaan yang tidak pasti). Lokasi penelitian ini di Indonesia, Thailand dan Vietnam dengan menguji teori ketangguhan pariwisata. Dalam pembangunan kembali sektor wisata disini covid-19, ada empat tren di Asia Tenggara yang melatarbelakangi ketidakpastian sekaligus menjadi peluang dan tantangan, yakni (1) diversifikasi mata pencaharian (2) regenerasi ekosistem (3) revitalisasi budaya dan

(4) pembangunan pariwisata domestik. Keempatnya saling terkait namun tidak dapat disatukan karena menimbulkan dilema. Missal antara mata pencaharian dan regenerasi ekosistem akibat ancaman Kesehatan selama pandemik, kedua merupakan dua hal yang bertolak belakang satu sama lainnya, namun hal itu terjadi di Asia Tenggara. Maka, teori ketangguhan pariwisata mengalami infasi selama pandemik ini. Maka jurnal ini menawarkan review terhadap teori ketangguhan pariwisata. Sekaligus melayangkan kritik terhadap penelitian yang terjadi selama pandemic berfokus pada sektor bisnisnya, yang seharusnya ketangguhan itu bersumber dari agen pariwisatanya. Tiga bentuk revitalisasi budaya (1) promosi budaya yang dibantu oleh pihak pemerintah (2) bauran budaya masyarakat karena selama pandemik terjadi tren migrasi penduduk dari kota ke desa (3) inisiatif revitalisasi budaya masyarakat dengan sentuhan digital dan kontemporer. Negara Asia Tenggara selama pandemik covid-19 memanfaatkan waktu untuk memperbaiki infrastruktur pariwisata, seperti Indonesia yang merealisasi rencana pembangunan destinasi pariwisata super premium.

Government Commitment to Tourism and Hospitality Sector During COVID-19 Pandemic karya Azizbek Allaberganov, Alexander Preko, dan Iddrisu Mohammed. Ketiganya melakukan penelitian tentang komitmen pemerintah Uzbekistan mempertahankan sektor pariwisata dan perhotelan selama pandemik covid-19. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah Uzbekistan menggunakan berbagai kebijakan dan tindakan yang diarahkan untuk mendatangkan wisatawan dan menyelamatkan bisnis pariwisata selama pandemi. Diantaranya kebijakan pemberian kompensasi finansial kepada wisatawan jika mereka terkena infeksi Covid-19, memperhatikan sanitasi, protokol, dan proteksi perjalanan untuk mencegah penyebaran virus. Dalam hal bisnis, Pemerintah berusaha memulihkan dan mengurangi dampak buruk Covid-19 di bidang pariwisata dan perhotelan dengan memberikan subsidi dan pelatihan bagi perusahaan mengikuti protokol kesehatan. Temuan lain dari penelitian ini menggambarkan bahwa pemerintah Uzbekistan harus terus memberi menginformasikan melalui media tentang informasi terkait strategi yang diterapkan untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata dan perhotelan, agar dapat membangun kepercayaan para wisatawan dan keberlangsungan bisnis selama masa pandemi.

Politik Pariwisata paska Pandemi Covid-19

K Wellness Tourism Berbasis Kearifan Lokal: Strategi Pengembangan Pariwisata Disini Covid-19 di Desa Bilebante, Nusa Tenggara Barat. Konsep wellness tourism di daerah ini telah diimplementasikan sejak sebelum covid-19. Setelah covid, ada pembaharuan kemitraan. Sesuai dengan Namanya, konsep wellness tourism berkenaan dengan wisata yang memiliki produk kesehatan. Ada dua prosuk utama yang ditawarkan oleh Desa Bilebante yakni “Sembek” dan “pretuk”. Keduanya merupakan metode pengobatan tradisional yang dilakukan oleh ahli spiritual. Pengobatan ini melalui media air yang telah diramu dengan doa-doa (mantra). Selain air doa, pengobatan ini dilengkapi dengan ramuan tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tertentu. Aktor yang terlibat pengembangan bidang pariwisata Desa Wisata Hijau (DWH) Bilebante diantaranya adalah pemerintah, masyarakat, dan perusahaan (Marta Tilaar) . DWH Bilebante dibimbing langsung oleh Kemenparekraf, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit atau GIZ dan bekerja sama dengan Martha Tilaar Group serta telah tersertifikasi Cleanliness, Health, Safety dan Environmental Sustainability (CHSE). Marta Tilaar membimbing langsung masyarakat untuk pengembangan pariwisata. Hasilnya, terdapat wisata olahraga bersepeda, Beauty Spa Visitation dengan pemandangan alam, Lifestyle Resort Visitation, pijat refleksi, serta pengenalan inovasi pengobatan tradisional seperti peretuk dan sembek. Pariwisata dengan menerapkan kekuatan kearifan lokal dalam beragam produk Desa Wisata Hijau (DWH) terbukti berpengaruh terhadap masyarakat. Dampak keterlibatan itu antara lain meningkatkan pendapatan (perekonomian), meningkatkan kepedulian akan lingkungan, dan meningkatkan kebanggaan akan identitas budaya. Pengembangan konsep kearifan lokal di DWH mampu mengubah keadaan ekonomi masyarakat desa wisata. Konsep pariwisata ini memanfaatkan aktivitas masyarakat seperti kirab budaya, pengobatan berbasis kearifan lokal masyarakat DWH Bilebante, kreasi budaya seperti kesenian musik dan tari. Menariknya, selain jasa pengobatan, DWH juga menyuguhkan pemandangan alam yang indah serta menyajikan kuliner khas masyarakat desa.

Bringing Environmental State Back In: Menakar Sentralitas Peran Pemerintah Dalam Kemitraan Multi pihak Untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Disini Covid-19 (Studi Kasus Wakatobi) merupakan salah satu artikel yang membahas arti penting aktor negara dalam sector pariwisata. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran sentral dalam recovery pariwisata paska pandemic. Negara tidak hanya mengarahkan juga sekaligus menentukan proses pembangunan pariwisata berkelanjutan, khususnya kasus di Wakatobi. Setidaknya ada tiga modal yang juga merupakan kelebihan negara yang tidak dimiliki oleh aktor lain. Ketiga modal tersebut yakni: otoritas legal formal, anggaran yang berkelanjutan, dan jaringan birokrasi. Ketiga modal tersebut sangat berpengaruh dalam mendukung peran sentral negara. Maka, dalam upaya pembangunan pariwisata berkelanjutan tertumpu pada aktor negara sebagai “environmental state”. Persepsi negara yang tertuang dalam visi dan komitmen yang kuat tentang pariwisata keberlanjutan akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan di sebuah negara. Dalam perhelatan G20, sebagai pimpinan konferensi Indonesia mengusung prinsip pulih bersama (recovery together), pulih lebih kuat (recovery stronger) dan pulih lebih baik (recovery better). Secara eksplisit disepakati bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas dalam program pemulihan ekonomi nasional maupun global.

Kepariwisataan berbasis kearifan lokal ini merupakan salah satu upaya menarik sebagai cara recovery minat wisatawan untuk berlibur di Desa Wisata Hijau (DWH) Bilebante. Pengembangan konsep wellness tourism berbasis kearifan lokal merupakan potret keberhasilan pariwisata menjadi moda dasar pembangunan dan benefit dari kolaborasi antar aktor. Kolaborasi tersebut cukup sukses memberikan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melek wisata sangat penting dalam pelaksanaan pengembangan program, peningkatan daya pikat serta citra destinasi wisata berbasis lokal. Dari Desa Bilebante melahirkan pemahaman bagaimana konsep wellness tourism ini, sebaiknya menjadi model pariwisata. Masyarakat selaku pengelola dan kehadiran para stakeholder saling bersinergi demi berhasilnya program pengembangan konsep wellness tourism di era new normal saat ini.

SIMPULAN

Berdasarkan linimasa pandemik Covid-19, peran dan aktor dalam produksi pariwisata mengalami perubahan. Kesimpulan akan disimpulkan berdasarkan aktor dan peran dalam pariwisata;

1. Sebelum pandemik, berdasarkan penelitian tentang TNK, menunjukkan bahwa peran pemerintah melakukan pembangunan hanya berfokus ada fasilitas pariwisata sedangkan pembangunan yang berorientasi kebutuhan masyarakat masih sangat rendah. Sedangkan pada saat terjadinya pandemik, peran pemerintah terfokus pada urusan penyelamatan jiwa akibat ancaman virus covid-19, sedangkan pariwisata diserahkan sepenuhnya atas kesadaran pasar atau masyarakat. Paska covid-19, pemerintah kembali memiliki peran ekstra dengan misi untuk pemulihan sektor pariwisata.
2. Peran pasar seperti tidak akan surut maupun jauh dari kegiatan pariwisata. Pasar seolah perantara hubungan antara pemerintah dan rakyat. Atas kondisi tersebut, kehadiran pasar memiliki setidaknya dua dampak rentan yang bisa menguntungkan ataupun sebaliknya, merugikan salah satu pihak. Dalam konsep Wellness tourism, peran pasar sangat bermanfaat bagi eksistensi dan pengembangan daerah wisata. Saat pandemic, Pemerintah Indonesia berfokus melakukan penyelamatan kehidupan rakyat indonesia menjadi peluang besar pasar untuk terlibat aktif dalam pembangunan pariwisata.
3. Masyarakat memiliki peran sentral dalam proses pengembangan pariwisata. Masyarakat dapat memainkan dua posisinya. Bercermin dari model implementasi kebijakan pariwisata sebelum pandemic, posisi masyarakat dalam pariwisata memungkinkan menjadi subyek maupun obyek dari “projek” pariwisata. Saat pariwisata digerakkan oleh masyarakat, sangat memungkinkan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat akan lebih kuat tentunya. Model ini bisa dikategorikan sebagai model pariwisata bottom up. Model ini tentunya ditunjang oleh kesiapan masyarakat sekitar Kawasan wisata. Sedangkan model kedua yakni minimnya keterlibatan masyarakat dalam pariwisata. Meskipun fasilitas pariwisata yang

disediakan oleh pemerintah NTT awalnya ditujukan untuk dapat memaksimalkan pendapatan masyarakat sekitar. Berdasarkan pengalaman pariwisata premium di kabupaten Manggarai Barat, menyiratkan bahwa inisiasi pariwisata dari sistem hirarkis akan berpeluang menciptakan masyarakat sipil yang apatis terhadap kehadiran pariwisata. Model ini dapat dilihat sebagai pendekatan top-down

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Kathlee M., Choe, Jaeyon. Mostafanezhad, Mary, dan Phi, Giang Thi. 2021. "pandemic tourism resiliency: Southeast Asian Lives and Livelihoods in Limbo". *Tourism Geographies*. Vol.23, No.4, PP 915-936. <https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1916584> (Diakses 12 Juni 2022)
- Allaberganov, Azizbek., Preko, Alexander., Mohammed, Iddrisu. 2021. "Government Commitment to Tourism and Hospitality Sector During COVID-19 Pandemic". *Tourism Critiques: Practice and Theory*. Emerald Publishing Limited. Vol. 2 No. 2, 2021 pp. 153-169. <https://www.emerald.com/insight/2633-1225.htm> (diakses 12 Juni 2022)
- Bianchi, Raoul. 2017. "The Political Economy of Tourism Development : A Critical Review". *Annals of Tourism Research* (2017), <http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2017.08.005> (diakses 12 Juni 2022)
- Borchers, Henning. 2008 *Dragon Tourism Revisited: The Sustainability of Tourism Development in Komodo National Park*. Hithock, Michael., King, Victor., Adam, Kathleen., dkk. "Tourism in Southeast Asia (challenges and New Directions)". Denmark.Nias Press.
- Buletin BPIW Sinergi, "Kementrian PUPR", edisi 44 Januari 2020. <https://bpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/Buletin%20BPIW%20SINERGI%20Edisi%2044%20-%20Januari%202020.pdf> (diakses 19 Mei 2022)
- de Kadt, E. 1979. "Tourism: Passport to development?". Oxford University Press. <https://doi.org/10.2307/2231772> (diakses 12 juni 2022)
- Gray, Matthew. 1997. "Political Economy of Tourism in Syria : State, Society, and Economic Liberalization". *Arab Studies Quarterly*. Vol. 19, No. 2, pp. 57-73
- Hertog, Johan Den. 2010. "Review of Economic Theories of Regulation". <http://www.uu.nl/rebo/economie/discussionpapers> (diakses 12 juni 2022)
- Hithock, Michael., King, Victor., Adam, Kathleen., dkk.2008. "Tourism in Southeast Asia (challenges and New Directions)". Denmark.Nias Press.
- Indonesia Tourism Development Corporation, 2022. "Tentang ITDC", <https://www.itdc.co.id/about-us> (diakses 19 mei 2022)

- James A. Caporaso dan David P. Levine. 1992. "Theories of Political Economy". Cambridge University press. Cambridge. https://www.academia.edu/9341032/159833685_Theories_of_Political_Economy_David_Levine (diakses 12 Juni 2022)
- Karim, Abdul Ghafur., Pramusinto, Agus., Sujito, Ari, dkk. 2020. "New normal : Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19". Yogyakarta. UGM-Press.
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021. <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/tentang-kami>. (diakses 16 mei 2022)
- Kodir, A., Tanjung, A., Sumarmi, Ahmad, R., Simanjuntak, T.B. 2019. "Tourism Governance In Komodo National Park, Indonesia: Blessing Or Curse?". *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 27(4), 1663–1667. <https://doi.org/10.30892/gtg.27424-443> (diakses 12 Juni 2022)
- Mckenna, Amy. 2021. "Travel of Polo Family". <https://www.britannica.com/biography/Marco-Polo> (diakses 12 juni 2022)
- Mosedale, Jan , 2014. "The Political Economy of Tourism: A Critical Perspective". London. Routledge.
- Pebrianto , Fajar. 2022. Jokowi Tetapkan Suntikan Modal Rp 470 Miliar untuk ITDC, <https://bisnis.tempo.co/read/1531252/jokowi-tetapkan-suntikan-modal-rp-470-miliar-untuk-itdc> (diakses 19 mei 2022)
- Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2018. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. <https://jdih.kemenparekraf.go.id/katalog-221-produk-hukum>, (diakses 11 Mei 2022)
- Sharpley, Richard. 2022. "Tourism and Development Theory: Which Way Now?", *Tourism Planning & Development*, Vol. 19, No.1, PP 1-12. <https://www.tandfonline.com/loi/rthp21> (diakses 12 juni 2022)
- Sharpley, Richard. dan Harrison, David. 2019. "A Research Agenda for Tourism and development". <https://doi.org/10.4337/9781788112413.00007> (diakses pada 12 juni 2022)
- UNESCO, 2021. World Harritage 44COM, <https://whc.unesco.org/archive/2021/whc-21-44com-18-en.pdf> (diakses 21 mei 2022)
- United Nations World Tourism Organization (UNWTO) , Technical Cooperation of Tourism Crisis, <https://www.unwto.org/technical-cooperation>. (diakses 21 Mei 2022)
- Wood, Robert E. 1980. "International tourism and cultural change in southeast Asia". *Economic Development and Cultural Change* .Vol. 28, No. 3, PP.561-581.
- Marina, Herni. 2012. "Ekonomi Politik Pariwisata Kawasan Wisata Lagoi Kabupaten Bintan". *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Prasiasa, Dewa Putu Oka. "Pengembangan Daerah Wisata dalam Bingkai Politik Pariwisata". *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*. VOL. 3, NO. 1, PP. 55-68